

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Isu hak asasi manusia (HAM) selalu menjadi pusat perhatian dalam setiap debat politik, terutama selama pemilihan presiden (Pilpres) di Indonesia. Hal ini tidak hanya karena HAM adalah aspek mendasar dalam kehidupan demokrasi, tetapi juga karena sejarah panjang pelanggaran HAM di Indonesia. Mulai dari era Orde Baru hingga pelanggaran yang lebih kontemporer yang terus menjadi luka bangsa yang belum sembuh. Dalam berbagai perhelatan Pilpres, isu-isu terkait HAM kerap muncul sebagai bahan perdebatan sengit antara para calon presiden, baik terkait komitmen terhadap hak-hak warga negara maupun dalam konteks keadilan hukum. Calon presiden diharapkan tidak hanya menyampaikan retorika, tetapi juga memberikan wawasan yang mendalam dan rencana aksi konkret terkait perlindungan HAM. Isu HAM mencakup beragam aspek, mulai dari penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif hingga perlindungan terhadap hak-hak minoritas.

Pada Pilpres 2014, isu pelanggaran HAM berat di masa lalu, seperti kasus penculikan aktivis tahun 1998, menjadi salah satu serangan terbesar yang ditujukan kepada Prabowo Subianto. Kasus ini menjadi topik yang sensitif karena sejarah panjang pelanggaran HAM di bawah rezim Orde Baru masih sangat membekas di ingatan publik. (Idhom, 2019). Pada Pilpres 2019, isu HAM menjadi sangat menonjol dalam beberapa sesi debat. Salah satu topik utama yang dibahas adalah ketidakadilan hukum, di mana Prabowo Subianto mengkritik bahwa hukum diterapkan secara tidak merata di bawah pemerintahan Joko Widodo. (Jatmiko, 2024).

Debat capres pertama Pilpres 2024, yang akan diadakan pada 12 Desember 2023, akan mengangkat tema "Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi." Tema ini mencakup isu-isu yang relevan dengan pemerintahan yang adil dan transparan, serta upaya memperkuat demokrasi di Indonesia. Dalam debat ini, masing-masing kandidat akan menyampaikan pandangan dan strategi mereka untuk menangani tantangan

dalam penegakan hukum dan hak asasi, serta langkah-langkah yang diusulkan untuk mengatasi korupsi dan meningkatkan integritas pemerintahan.

Dalam debat pertama Pilpres 2024, isu Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi sorotan utama di antara para kandidat. Mereka membahas berbagai aspek pelanggaran HAM yang masih terjadi di Indonesia, termasuk kasus-kasus yang belum terpecahkan dari isu pemilihan di tahun sebelumnya. Seperti kasus aktivis 98 dan penculikan, isu wadas dan konflik di Papua. Selain itu, para kandidat mengangkat isu perlindungan terhadap perempuan dan anak, mengingat tingginya angka kekerasan yang masih berlangsung. Di sisi lain, reformasi hukum menjadi tema sentral, dengan harapan dapat meningkatkan akses keadilan dan memperkuat penegakan HAM di seluruh negeri.

Isu Hak Asasi Manusia (HAM) menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Indonesia kembali menjadi fokus perhatian media, mengingat meningkatnya pelanggaran yang terjadi di berbagai wilayah, terutama di Papua. Beberapa media terkemuka, seperti Kompas, Tempo, CNN Indonesia, dan Suara.com, gencar memberitakan tentang isu-isu terkait HAM, seperti penindasan kebebasan berpendapat, pengawasan terhadap aktivis, dan kekerasan terhadap kelompok minoritas. Data analisis media menunjukkan bahwa Kompas dan Tempo adalah dua outlet yang paling sering mengangkat isu HAM dalam konteks Pilpres 2024, memberikan sorotan yang mendalam terhadap kebijakan kandidat dan respon masyarakat terhadap pelanggaran yang terjadi.

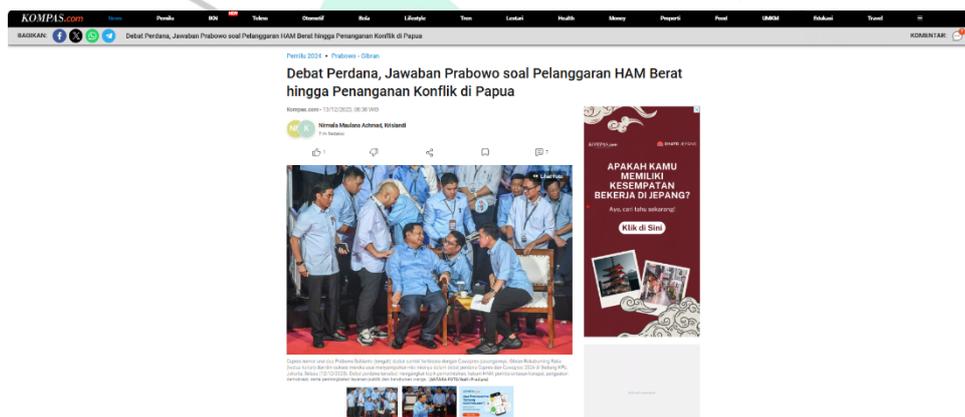
Tabel 1.1 Media dan Jumlah Berita

| No | Media         | Jumlah Berita |
|----|---------------|---------------|
| 1  | Kompas.com    | 14            |
| 2  | Tempo.co      | 15            |
| 3  | CNN Indonesia | 11            |
| 4  | Suara.com     | 15            |

Data di atas menyajikan jumlah berita tentang isu hak asasi manusia (HAM) yang diterbitkan oleh empat media terkemuka di Indonesia menjelang Pilpres 2024. Berdasarkan data tersebut, didapati bahwa Kompas dan Tempo secara konsisten memberitakan isu HAM dalam debat pertama dengan pemilihan isu yang hampir serupa. Selain itu kedua media tersebut memiliki ideologi yang berbeda. Kompas

secara konsisten mengangkat isu-isu HAM namun menempatkan diri sebagai media yang netral dalam menilai sikap pemerintah dalam isu HAM. Sementara Tempo sebagai media yang juga konsisten mengangkat isu HAM menempatkan diri sebagai oposisi pemerintah termasuk dalam penanganan HAM. Untuk itu penelitian ini berfokus pada pbingkaihan isu HAM dalam debat pertama di kedua media tersebut.

Pemberitaan yang intensif ini mencerminkan pentingnya media dalam membangun kesadaran publik akan masalah HAM di Indonesia, terutama menjelang pemilihan presiden, yang diharapkan dapat mendorong calon pemimpin untuk memperhatikan dan menegakkan hak asasi manusia di dalam kebijakan mereka. Dengan demikian, media berperan penting dalam menciptakan ruang untuk diskusi dan pengawasan terkait perlindungan HAM, mendorong transparansi, serta akuntabilitas di kalangan kandidat dalam Pilpres 2024.



Gambar 1.1 Artikel Berita terkait Debat Pertama Capres Bahas Penuntasan Pelanggaran HAM  
Sumber : Kompas.com

Artikel Di Atas Merupakan Salah Satu Berita Kompas.Com Yang membahas debat perdana calon presiden Prabowo Subianto pada Desember 2023. Dalam debat, Prabowo menjawab pertanyaan terkait pelanggaran HAM berat yang pernah dituduhkan kepadanya, serta membahas penanganan isu HAM di masa mendatang. Prabowo menegaskan bahwa tuduhan pelanggaran HAM terhadap dirinya tidak terbukti secara hukum. Dari artikel di atas Kompas.com memiliki banyak komentar terkait debat capres 2024 dalam isu HAM, dalam komentar di artikel tersebut cenderung netral tidak memihak dan menyudutkan calon capres dan cawapres. Media ini menekankan perlunya penanganan serius dari para capres.



Gambar 1.2 Pemberitaan terkait Debat Capres Putaran Pertama Pada Isu Hak Asasi Manusia  
Sumber : Tempo.co

Artikel di atas merupakan salah satu berita dari tempo.co yang membahas alasan mengapa Prabowo Subianto tidak menggunakan isu Wadas untuk menyerang Ganjar Pranowo dalam debat capres. Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil karena mereka ingin menjaga debat tetap substansial dan tidak menggunakan isu lokal untuk menyerang pribadi lawan politik. Mereka lebih fokus pada gagasan kebijakan yang relevan untuk kepentingan nasional daripada menyerang berdasarkan isu kontroversial yang terjadi di daerah tertentu. Dari artikel di atas melihat narasumber yang di wawancara menyebutkan bahwa apabila prabowo menanyakan isu wadas terhadap ganjar, tim dari ganjar pranowo sudah menyiapkan jawabannya, dan dari tim ganjar selalu menyudutkan hal tersebut ke calon capres, artikel ini menimbulkan pro dan kontra baik dari publik maupun pemerintahan. Gaya peliputan Tempo khas karena tidak hanya menyampaikan peristiwa, tetapi juga memberikan analisis lebih dalam terkait motivasi politik dan dampak sosial dari keputusan para kandidat atau pejabat. Dalam kasus Wadas, mereka menjelaskan bahwa keputusan Prabowo yang tidak menyerang Ganjar lebih karena alasan strategi, meski Ganjar berada di bawah tekanan terkait penanganan konflik tersebut.

Media seperti Kompas dan Tempo berperan besar dalam menginformasikan publik secara objektif dan kritis, memantau serta mengawasi tanggung jawab politikus dalam memperjuangkan HAM. Selain memberikan informasi, media juga harus berfungsi sebagai penyampai tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas

pemerintah. Dalam debat politik, terutama pilpres, isu-isu HAM kerap menjadi bahan diskusi hangat, dan media berperan dalam memastikan bahwa isu-isu tersebut dibahas secara substantif, bukan sekadar bahan kampanye politik. Misalnya, media tidak hanya melaporkan janji kandidat, tetapi juga menghubungkannya dengan rekam jejak HAM mereka, seperti dalam kasus Wadas atau pelanggaran HAM berat masa lalu. Dengan demikian, media menjadi jembatan antara publik dan kandidat, memastikan agar setiap pembahasan terkait HAM mengarah pada perubahan konkret, bukan sekadar janji kosong. Dalam konteks ini, media yang profesional harus menyeimbangkan laporan dengan menyampaikan kritik dan fakta yang mendukung dialog yang lebih mendalam tentang HAM di Indonesia.

Di Indonesia sendiri Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan pondasi utama yang menjamin martabat dan kebebasan setiap individu, tanpa terkecuali. Di Indonesia, isu-isu HAM telah menjadi bagian penting dari diskursus sosial dan politik, mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh berbagai kelompok masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak dasar mereka. Meski sudah terdapat berbagai upaya dan kebijakan untuk menegakkan HAM, kenyataannya masih banyak pelanggaran dan ketidakadilan yang terus terjadi. Dalam konteks yang semakin kompleks ini, penting untuk mengkaji berbagai isu HAM yang mencuat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Mulai dari diskriminasi etnis dan gender, hingga hak atas kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup, semua isu ini menunjukkan betapa pentingnya penegakan HAM bagi terciptanya keadilan sosial yang merata. (Setiawan et al., 2023).

Di Indonesia, Hak Asasi Manusia (HAM) masih menghadapi sejumlah tantangan serius yang berdampak pada banyak aspek kehidupan masyarakat. Salah satu permasalahan yang paling problematis adalah diskriminasi ras dan etnis yang sering dialami oleh kelompok minoritas, seperti masyarakat Papua. Mereka kerap menghadapi stigma, marginalisasi, dan kekerasan yang menghambat akses mereka terhadap kebutuhan mendasar, seperti pendidikan dan pekerjaan. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan juga merupakan permasalahan HAM yang menimbulkan kekhawatiran. Sebagaimana disampaikan Komnas Perempuan, kekerasan berbasis gender, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan

seksual, masih terus terjadi dan bahkan mungkin semakin parah seiring berjalannya waktu. Di Indonesia, Hak Asasi Manusia (HAM) masih menghadapi sejumlah tantangan serius yang berdampak pada banyak aspek kehidupan masyarakat. (Setiawan et al., 2023).

Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki kaitan yang sangat penting dengan presiden sebagai kepala pemerintahan, karena presiden bertanggung jawab dalam menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak tersebut. Dalam posisinya, presiden memiliki kekuasaan untuk menetapkan kebijakan nasional yang bertujuan melindungi hak-hak dasar warga negara, seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak untuk memperoleh pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk hidup dalam keamanan dan martabat. (Setiawan et al., 2023). Presiden juga berperan dalam memastikan pelaksanaan hukum yang adil dan transparan agar pelanggaran HAM dapat diusut dan pelakunya diadili. Selain itu, sebagai kepala pemerintahan, presiden harus memimpin dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial, serta mencegah segala bentuk diskriminasi, sehingga HAM dapat dinikmati oleh semua warga negara tanpa pengecualian. Melalui fungsi dan wewenang tersebut, presiden memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan pemerintahan yang menghormati HAM dan memastikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Komitmen kepala negara atau presiden terhadap HAM juga tercermin dalam penegakan prinsip-prinsip demokrasi, di mana hak untuk bersuara, berkumpul, dan berpartisipasi dalam pemerintahan harus dijamin. Dalam situasi krisis atau konflik, presiden memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak mengorbankan hak-hak individu demi kepentingan keamanan atau stabilitas. Oleh karena itu, kepemimpinan yang responsif dan inklusif sangat penting untuk mencegah pelanggaran HAM yang dapat terjadi dalam keadaan darurat. (Ramadhani, N. 2023)

Debat capres 2024 memberikan wawasan menarik mengenai cara pandang para kandidat terkait Hak Asasi Manusia (HAM). Ketiga calon presiden, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, masing-masing mengutarakan pandangan mereka terkait isu-isu HAM, terutama dalam konteks perlindungan kelompok rentan dan penyelesaian konflik. Anies Baswedan menekankan pentingnya keadilan dalam penyelesaian konflik HAM, khususnya di Papua,

dengan menyoroti bahwa masalah di sana bukan hanya soal kekerasan fisik, tetapi lebih pada ketidakadilan yang terjadi. Ia juga mengkritisi berkurangnya kebebasan berbicara dan menurunnya indeks demokrasi di Indonesia, serta menolak penggunaan pasal-pasal karet yang menghambat kebebasan masyarakat.

Prabowo Subianto menegaskan bahwa lembaga kehakiman harus independen dari intervensi, terutama dalam menangani masalah hukum yang berkaitan dengan HAM. Ia juga membela keputusan terkait Mahkamah Konstitusi yang dinilai kontroversial, dengan alasan bahwa keputusan tersebut sudah bersifat final. Ganjar Pranowo menekankan pentingnya inklusi kelompok rentan, seperti perempuan hamil, manula, dan penyandang disabilitas, dalam kebijakan pelayanan publik. Ia berjanji untuk menuntaskan isu-isu yang terkait dengan HAM di masa pemerintahannya. Pandangan yang diutarakan para kandidat mencerminkan komitmen mereka terhadap penyelesaian masalah HAM yang berbeda, tetapi tetap menyoroti pentingnya keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat. (Nancy & Debora, 2023). Anies Baswedan berfokus pada masalah HAM di Papua, menegaskan bahwa isu tersebut harus diselesaikan dengan keadilan, bukan hanya menghentikan kekerasan fisik. Ia menyoroti ketidakadilan sebagai akar masalah dan menyatakan perlunya pendekatan yang lebih adil dan manusiawi. Selain itu, Anies juga mengkritik penggunaan pasal-pasal karet yang digunakan untuk membungkam kebebasan berbicara, mencerminkan keprihatinannya terhadap menurunnya indeks demokrasi dan kebebasan di Indonesia. (Nancy & Debora, 2023).

Media memiliki peran krusial dalam mempublikasikan isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM), berfungsi sebagai pengawas yang memantau dan melaporkan berbagai pelanggaran HAM di masyarakat. Dengan menyoroti isu-isu seperti diskriminasi, kekerasan, dan penindasan, media berkontribusi dalam menekan pemerintah dan pihak berwenang untuk bertindak memperbaiki kebijakan serta mengambil tanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi. Media juga memberikan panggung bagi korban untuk bersuara, meningkatkan kesadaran publik, dan mendorong solidaritas sosial dalam membela HAM, khususnya bagi kelompok yang rentan, seperti minoritas dan disabilitas. Selain itu, pemberitaan yang

dilakukan media sering kali mampu menggerakkan diskusi publik tentang HAM dan memfasilitasi dialog antara berbagai pihak. (Ramadhan & Afala, 2022).

Dengan mendistribusikan informasi secara luas, media dapat mendorong aksi internasional terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di suatu negara, sering kali memicu tekanan global yang berujung pada reformasi hukum atau kebijakan. Ini menjadikan media sebagai instrumen perubahan sosial yang kuat, menggerakkan dukungan publik menuju perlindungan HAM yang lebih baik. Namun, media juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas dan obyektivitas dalam pemberitaan. Penyampaian berita yang akurat dan tidak memihak sangat penting agar publik mendapatkan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Kebebasan pers dan independensi media sangat diperlukan agar pemberitaan tentang HAM dapat dilakukan tanpa pengaruh dari pihak-pihak tertentu. Dengan demikian, media bukan hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga motor perubahan dalam advokasi HAM yang efektif dan bertanggung jawab. (Ramadhan & Afala, 2022). Dalam media yang dipilih oleh peneliti yaitu Kompas dan tempo memiliki perbedaan dalam meliput berita Kompas dan Tempo memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam gaya dan pendekatan pemberitaan mereka. Kompas cenderung mengadopsi pendekatan yang lebih moderat, netral, dan ramah bagi pembaca luas. Berita yang disajikan lebih fokus pada informasi faktual yang mudah dipahami dan mencakup berbagai topik dari nasional hingga regional, sering kali menghindari kontroversi. Di sisi lain, Tempo dikenal dengan gaya pemberitaan yang lebih kritis dan investigatif. Tempo berani mengangkat isu-isu sensitif seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kebijakan pemerintah yang kontroversial, dengan laporan yang biasanya lebih mendalam dan analisis.

Berdasarkan pemaparan diatas penelitian ini melihat perbedaan pembedaan antara media kompas.com dan tempo.co terkait pemberitaan debat mengenai HAM dalam debat pilpres 2024. Pada penelitian ini menggunakan Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah konstruktivisme, yang menganggap bahwa realitas sosial dibangun secara sosial dan tidak dapat dipahami secara objektif. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif, dengan tujuan memahami konstruksi sosial dari realitas yang diamati. (MAG, 2024). Dengan menggunakan metode kualitatif dengan cara analisis framing

model yang digunakan dalam penelitian ini dikembangkan oleh Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki. Model tersebut mengasumsikan bahwa setiap berita memiliki sebuah frame yang menjadi inti dari struktur ide. Frame merupakan suatu konsep yang terkait dengan berbagai elemen dalam teks berita, dan hubungannya membentuk makna. Melalui perangkat tanda yang disajikan dalam teks, dapat dilihat bagaimana seseorang memberikan makna terhadap suatu peristiwa. (Kriyantono, 2022). Kemudian unit analisis penelitian ini adalah berita debat seputar pilpres 2024 di media online kompas.com dan tempo.co dengan periode 07 november 2023 sampai dengan 21 januari 2024. Dengan pertimbangan pemilihan periode tersebut karena masa sebelumnya debat calon presiden dan pelaksanaan debat pertama selesai dan satu minggu setelah acara debat pertama selesai, dan pengamatan selesai satu minggu sebelum debat pilpres ke dua dimulai. Jumlah berita dari masing-masing media yaitu Kompas.com. dan tempo.co berjumlah 12 berita.

Penelitian ini juga menggunakan referensi tiga penelitian sebelumnya. penelitian pertama berjudul “Isu HAM dalam Kontestasi Pemilu 2014” Sebuah Pendekatan Framing dan Ideologi Media. Saat ini, media massa Indonesia kerap mengabaikan etika dan tanggung jawab sosialnya dalam memberitakan. Ruang publik masih menjadi bagian dari atmosfer. pencerahan bagi masyarakat luas. Justru masyarakat umum yang menjadi korban kepolosannya. Berbagai kepentingan yang ada di media massa, turut berkontribusi dalam menciptakan kebijakan informasi di dalamnya Ruang publik. Lebih banyak media yang cenderung melakukan hal tersebut banyak fungsi praktis untuk Pentingnya pemilik media yang Selain itu, kebetulan adalah tanda kekuatan politik dan ekonomi. Jika tidak, Info di atas berasal dari media luar. Hal ini disebabkan oleh faktor finansial itu melibatkan dunia usaha dan korporasi. (Halimatusadiah, 2014).

Penelitian kedua yang memunculkan tentang isu HAM juga dengan judul “Kontestasi Nilai-Nilai Asia dan Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun 1991-1999,” (Mahesti Hasanah, 2019). dengan hasil temuan penelitian tersebut Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat umum mengenai hak asasi manusia melalui program dan kampanye pendidikan yang sistematis. Pemerintah juga harus menerapkan reformasi kebijakan yang konsisten dalam implementasi HAM,

memperkuat institusi yang teguh, dan memastikan peristiwa yang terjadi. Mendorong dialog konstruktif antara pemerintah dan masyarakat umum dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan-tantangan HAM. Selain itu, penerapan sistem pemeliharaan yang efektif dan melakukan evaluasi kritis sangat penting untuk menentukan kemajuan. Kerja sama internasional dan organisasi sipil masyarakat bekerja sama untuk mendukung advokasi dan pemeliharaan HAM. Melalui penelitian dan penelitian lanjutan diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara norma dan praktik HAM yang ada serta mendorong penerapan HAM yang lebih konsisten dan efektif di Indonesia.(Mahesti Hasanah, 2019).

Penelitian terdahulu yang terakhir yang mengangkat tentang isu HAM juga berjudul “Ekonomi Politik Media Lokal (Framing Pemberitaan Pelanggaran HAM Di Kalimantan Timur)”. (Nurul Shobah, 2022). Hasil temuan penelitian menunjukkan ada beberapa hal yang dapat dikemukakan dalam kajian Ekonomi Politik Media Lokal dengan penekanan pada framing pemberitaan HAM di Timur. Pertama, penting untuk mempelajari lebih jauh teori framing Robert Entman guna mengidentifikasi elemen-elemen kunci dalam pemberitaan. Selain itu, diversifikasi sumber data dengan menyertakan media sosial dan blog lokal dapat memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif. Analisis komparatif antara pemberitaan media lokal dan nasional juga dapat menyoroti perbedaan dalam pembingkai. Pengkajian latar belakang pemilik media akan membantu mereka memahami dampak bisnis atau politik terhadap pemberitaan. Penelitian mengenai peran LSM dan komunitas Sipil dalam membingkai pemberitaan juga diperlukan, begitu pula penelitian mengenai dampak media lokal terhadap opini publik. Terakhir, sangatlah penting untuk memberikan rekomendasi guna meningkatkan praktik jurnalistik dalam penelitian HAM.(Nurul Shobah, 2022).

Bedasarkan pemaparan di atas penelitian ini menggunakan judul ”PEMBINGKAIAN ISU HAK ASASI MANUSIA DALAM DEBAT PILPRES PERTAMA PADA MEDIA ONLINE (Analisis Framing Zhondang pan & Gerald M.Kosicki Pada Berita Kompas.com dan Tempo.co)”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “ Bagaimana pembingkaiian pemberitaan debat calon presiden 2024 yang bertemakan HAM (Hak Asasi Manusia) pada media Kompas.com dan Tempo.co.pada periode 07 November 2023 – 21 Januari 2024 ?”

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembingkaiian pemberitaan Debat calon Presiden 2024 yang bertemakan HAM (Hak Asasi Manusia) pada media Kompas.com dan tempo.co pada periode 03 November sampai dengan 21 Januari 2024.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini memiliki manfaat akademis yang signifikan dalam beberapa aspek.

1. Penelitian ini memperkaya kajian di bidang komunikasi yang menggunakan metode framing model Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki.
2. Penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian pada media berita online dengan topik HAM (Hak Asasi Manusia) dalam kontestasi politik.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini meliputi beberapa aspek.

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana kecenderungan media berita dalam membingkai isu ham sebagai isu mendasar dalam jurnalistik.
2. Penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi khalayak berita mengenai isu HAM dalam kontestasi politik serta keberpihakan media.